# PENGATURAN SANKSI HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL OLEH WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA

Ni Made Shintya Melati
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar
Email: shinmxyz@gmail.com

## Abstract

*This study aims to analyze the legal sanctions governing the misuse of residence permits by foreign nationals in Indonesia and to compare them with the regulations applied in Singapore. The research is motivated by the continued occurrence of residence permit violations, which create legal uncertainty in immigration law enforcement. This study employs normative legal research using statutory and comparative approaches, supported by primary, secondary, and tertiary legal materials. The theoretical framework consists of the theory of legal certainty and the theory of legal protection. The findings indicate that legal sanctions in Indonesia are regulated under Law Number 6 of 2011 concerning Immigration; however, ambiguities remain in its implementation, particularly regarding the misuse of residence permits. In comparison, Singapore applies stricter, more consistent immigration enforcement with stronger deterrent sanctions. Therefore, improvements to Indonesia's immigration regulations are necessary to strengthen legal certainty, enhance law enforcement effectiveness, and safeguard national sovereignty.*

***Keywords*** *: misuse of residence permits, foreign nationals, legal sanctions, immigration law, legal certainty.*

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan sanksi hukum terhadap penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing di Indonesia serta membandingkannya dengan pengaturan yang berlaku di Singapura. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya penyalahgunaan izin tinggal yang menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan hukum keimigrasian. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan, yang didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Landasan teori yang digunakan meliputi teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan sanksi di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, namun masih terdapat kekaburan norma dalam penerapannya, khususnya terkait penyalahgunaan izin tinggal. Dibandingkan dengan Singapura, sistem penegakan hukum keimigrasian lebih tegas, konsisten, dan memberikan efek jera yang lebih kuat. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan pengaturan hukum di Indonesia agar tercipta kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, dan perlindungan terhadap kedaulatan negara.



**Kata Kunci** : penyalahgunaan izin tinggal, warga negara asing, sanksi hukum, keimigrasian, kepastian hukum.